

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

TESIS



Oleh

YUDI ARIANTARA

C2A012046

**UNIVERSITAS BENGKULU
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

2014

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

TESIS

Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister

Oleh

YUDI ARIANTARA

C2A012046

**UNIVERSITAS BENGKULU
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2014**

MOTTO

***JANGAN MENYERAH
TETAP OPTIMIS UNTUK KEHIDUPAN
YANG LEBIH BAIK
SEMANGAT!!***

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua orangtuaku tercinta,
Yulian Anwar, Ir dan Farida
Sebagai wujud baktiku untuk
Bisa membahagiakan mereka**

- **Istriku tercinta Erike Marviska
Sebagai penerang dalam hidupku**



PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Adalah hasil karya saya. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikaan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja dengan ini saya menyatakan menarik tesis yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bengkulu, 8 Juli 2014
Yang membuat pernyataan,


 6000
Yudi Ariantara

ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT PLANNING IN PONDOK KELAPA DISTRICT, BENGKULU TENGAH REGENCY

Yudi Ariantara¹⁾
Handoko Hadiyanto²⁾
Yusnida³⁾

ABSTRACT

This research has aims to: 1) analyze the level of community participation in development planning in Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency; 2) identify the factors determining the level of community participation in development planning in Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency.

This research is a qualitative with the primary objective to analyze the level of community participation in development planning in Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency. Data collection techniques in this research using questionnaires and interviews.

The results of the research for the purpose of analyzing the level of community participation in development planning in the District Pondok Kelapa is low, this means that the level of community participation has been less active in the implementation of development planning in Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency. As for identifying the factors determining the level of community participation in Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency, the other factors than education, occupation, gender, and socio-cultural background, there are other factors that village elite power factor. While there are all the factors, the sex factor is a factor that is selected by respondents as the most decisive factor in determining the level of community participation Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency

Keywords: Participation, Development Planning, Community Participation, Participatory Planning

- 1) Student*
- 2) Supervisor*
- 3) Co Supervisor*

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Yudi Ariantara¹⁾
Handoko Hadiyanto²⁾
Yusnida³⁾

RINGKASAN

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu masyarakat memiliki bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya saat ini masih banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kurang melibatkan peran aktif masyarakat di daerah itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dan mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis pembobotan yang dinilai dalam skala likert dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah apabila dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan dimensi yang ada adalah sedang. Dari keseluruhan dimensi yang ada, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah, ini berarti tingkat partisipasi masyarakat masih kurang aktif dalam setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya merupakan faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Responden menilai bahwa jenis kelamin adalah faktor yang paling menentukan daripada faktor yang lainnya. Selain dari faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, latar belakang sosial budaya, terdapat faktor penentu lain yaitu faktor kekuasaan elit yang ada di Desa.

Hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan oleh Pemerintah daerah sehingga dapat memperbaiki dan menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

- 1) *Mahasiswa*
- 2) *Pembimbing Utama*
- 3) *Pembimbing Pendamping*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Judul tesis ini adalah “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah” Dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dalam berbagai bentuk sehingga proses yang penulis jalani berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc selaku Koordinator Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Bengkulu
2. Drs. Handoko Hadiyanto, MS., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini..
3. Yusnida, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini..
4. Dr. Mochamad Ridwan, SE., MP dan Benardin, SE., MT selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan dan perbaikan Tesis.
5. Bapak / Ibu dosen Magister Perencanaan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan restu dan do'a terbaik sampai penulis menyelesaikan tesis dan pendidikan ini
7. Istri tercintaku Erike Marviska yang selalu memberikan semangat, doa, dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis dan pendidikan ini
8. Adik-adikku Dani dan Gina tersayang, sahabatku Ragowo, Ken Anjang dan teman-teman seperjuangan Magister Perencanaan Pembangunan Unib angkatan xi yang telah memberikan masukan dan dorongan moril kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan ini
9. Pihak-pihak yang telah memberikan andil terhadap penyelesaian tesis ini.

Bengkulu, 8 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan Tesis	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis	vi
Abstract	vii
Ringkasan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi	6
2.1.2 Perencanaan Pembangunan	7
2.1.3 Partisipasi Masyarakat	10
2.1.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15
2.1.5 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Analisis	24

BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Definisi Operasional	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Metode Pengambilan Sampel	29
3.6 Metode Analisis	31
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1 Deskripsi Data	35
4.1.2 Alur Tahapan Perencanaan Pembangunan	37
4.1.3 Karakteristik Responden	44
4.1.4 Hasil Perhitungan	45
4.1.4.1 Fokus Pada Kepentingan Masyarakat	45
4.1.4.2 Partisipatoris	48
4.1.4.3 Dinamis	49
4.1.4.4 Sinergitas	50
4.1.4.5 Legalitas	52
4.1.4.6 Fisibilitas	54
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat	56
4.2.2 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat	59
4.3 Implikasi Hasil Penelitian	67
BAB V: PENUTUP	
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	70
5.3 Keterbatasan Penelitian	71
5.6 Rekomendasi Untuk Penilaian Lebih Lanjut	71
Daftar Pustaka	73
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2013	3
3.1	Informan Dalam Penelitian	30
3.2	Operasionalisasi Variabel	33
4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013	35
4.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)	36
4.3	Tujuan, Agenda, Keluaran, dan peserta pada setiap tahapan P5D	37
4.4	Karakteristik Responden Penelitian	44
4.5	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fokus Pada Kepentingan Masyarakat	46
4.6	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Fokus Perencanaan Partisipatif Terhadap Kepentingan Masyarakat	47
4.7	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Partisipatoris	48
4.8	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Partisipatoris Dalam Perencanaan Partisipatif	49
4.9	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dinamis	49
4.10	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dinamis	50
4.11	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Sinergitas dalam Perencanaan Partisipatif	51
4.12	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Sinergitas dalam Perencanaan Partisipatif	52
4.13	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Legalitas dalam Perencanaan Partisipatif	
4.14	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Legalitas dalam Perencanaan Partisipatif	54
4.15	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fisibilitas dalam Perencanaan Partisipatif	55
4.16	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fisibilitas dalam Perencanaan Partisipatif	55
4.17	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Semua Dimensi	56
4.18	Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pondok Kelapa	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Model Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Bengkulu Tengah	9
2.2	Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	10
2.3	Langkah-langkah perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah	11
2.4	Kerangka analisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil Jawaban Responden Kuesioner	74
2. Daftar Pertanyaan Kuesioner	75
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu masyarakat memiliki bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya saat ini masih banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kurang melibatkan peran aktif masyarakat di daerah itu sendiri. Semua itu dapat terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak terawat, dikarenakan pembangunan tersebut tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, contoh nyata yang sering terlihat yaitu pembangunan wc umum yang nyatanya hanya menjadi monumen karena tidak adanya tindakan pemeliharaan oleh masyarakat maupun pemerintah,

Pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Seperti terlihat dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, yang seharusnya diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, sampai dengan musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan

termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini semua bisa terwujud apabila Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi sasaran penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 merupakan penjabaran RPJMD 2010-2014 dengan memperhatikan isu strategis atau isu kebijakan pembangunan. Selain itu penentuan prioritas pembangunan memperhatikan pula capaian kinerja periode sebelumnya, kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten, prioritas pembangunan Propinsi Bengkulu dan pemerintah Pusat maupun aspirasi masyarakat/kebutuhan pembangunan yang telah diidentifikasi selama proses pelaksanaan Musrenbang, sehingga pada akhirnya berakumulasi menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci ke dalam program/kegiatan pembangunan, pada masing-masing prioritas pembangunan dilengkapi dengan fokus-fokus program, sehingga intervensinya menjadi terarah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dari hasil prasarvei diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah rendah. Hal ini dibuktikan dari daftar hadir pelaksanaan musrenbangcam tahun 2013 yang hanya dihadiri

oleh 45 orang perwakilan dari seluruh desa yang ada di kecamatan Pondok Kelapa atau hanya 44 % dari 102 undangan. Menurut pendapat Camat kecamatan Pondok Kelapa, rendahnya partisipasi masyarakat dapat terlihat dari kurangnya antusiasme masyarakat untuk hadir dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan musrenbang baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, kondisi ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan, pendapatan, latar belakang etnis, dan kekuasaan elit desa.

Tabel 1.1. Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2013

No	Nama Desa	Jabatan						Total
		Kades	Sekdes	BPD	Ketua RT	Tokoh Perempuan	Masyarakat Setempat	
1	Pekik Nyaring	√	√	√			√	4
2	Pasar Pedati	√	√					2
3	Srikaton	√	√	√	√	√	√	6
4	Panca Mukti	√		√		√		3
5	Srikuncoro	√	√	√				3
6	Pondok Kelapa	√	√				√	3
7	Harapan	√	√	√				3
8	Sunda Kelapa	√	√	√	√	√	√	6
9	Abu Sakim	√		√				2
10	Padang Betuah		√					1
11	Talang Pauh					√		1
12	Sidodadi	√	√	√				3
13	Sidorejo	√	√	√				3
14	Bintang Selatan		√					1
15	Talang Boseng							
16	Pagar Dewa		√					1
17	Kembang Ayun	√	√	√				3
Total		12	13	10	2	4	4	45
Persentase (%)		71	76	59	12	23	23	44

Sumber : Berita Acara Musrenbangcam Pondok Kelapa, 2013

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam rencana pembangunan di suatu daerah, sehingga fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap masalah tersebut

adalah untuk menganalisa sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Faktor apa saja yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dengan fokus tujuan untuk mengetahui tingkat pasrtisipasi masyarakat dan mengidentifikasi faktor penentu tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa dikarenakan jumlah Penduduk di Kecamatan Pondok Kelapa paling banyak dibandingkan Kecamatan lain yang ada di Kabupaen Bengkulu Tengah, dan data yang akan di teliti adalah data perencanaan pada tahun 2013.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2008). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan. perubahan yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation building*)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) *self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *freedom for survitute*, yaitu kemampuan

untuk memilih secara bebas. Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman (Jtokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2.1.2 Perencanaan Pembangunan

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan itu dilaksanakan. Secara hierarki, prosedur perencanaan itu dilakukan atas dasar prinsip *Top-Down Planning*, yaitu proses perencanaan

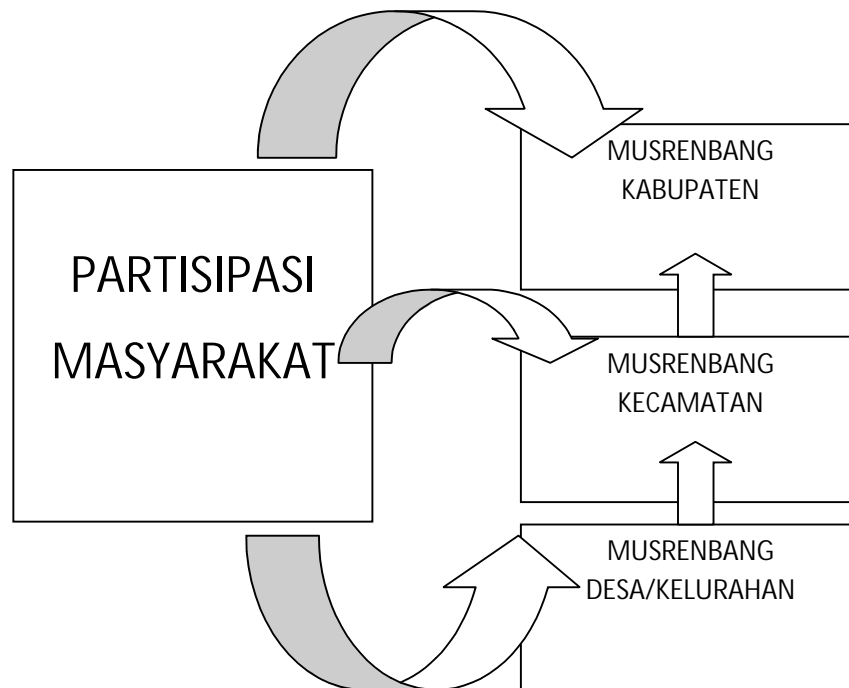
yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi suatu organisasi kemudian atas dasar keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat yang lebih rendah. Prinsip lainnya adalah lawan dari prinsip di atas yaitu *Bottom-Up Planning* yang merupakan perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah.

Istilah “perencanaan pembangunan”, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, “perencanaan” diartikan berbeda-beda dalam buku yang berbeda. Menurut Conyers & Hills (1994) mendefinisikan “perencanaan” sebagai “suatu proses yang bersinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.” Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Menurut Diana Conyers (1994:5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya, Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas,

sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.



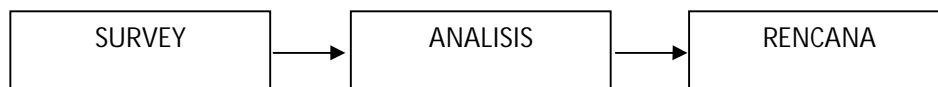
Gambar 2.1: Model Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Bengkulu Tengah

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain: Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

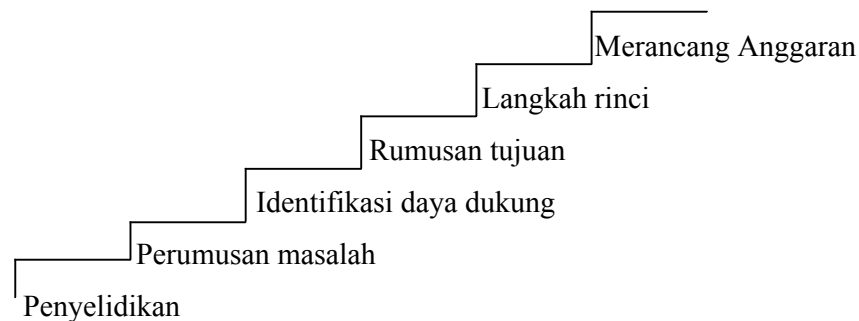
Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut:



Gambar 2.2 : **Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan**

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Robert pada dasarnya sependapat dengan Geddes. Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Alexander Abe (2002 : 81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan

yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.” Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan sebagai berikut:



Gambar 2.3 : Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif Yang Disusun Dari Bawah

Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.

5. Langkah rinci

Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.

6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Bintoro bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab. Pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Pandangan Bintoro di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan

Situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Pusic (dalam Adi, 2001 : 206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari

permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001 : 208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (*non direktif*), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

- a. Tahap Assesment
- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai

akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

2.1.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan

kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu:

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas

apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.

2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak

jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.

3. Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan dengan baik apabila prakondisi

yang diperlukan dapat terpenuhi. Setidaknya ada enam prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

a. Saling percaya.

Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama. Untuk menumbuhkan rasa saling

percaya dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan.

b. Kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan

perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan

tertekan (bhs. Jawa; rikuh atau ewuh-pekwuh).

c. Demokratis.

Prinsip demokrasi menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan

kesepakatan bersama, bukan merupakan rekayasa kelompok tertentu.

d.Nyata.

Perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang

nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau kepalsuan

(fiktif).

e.Taat asas dalam berpikir.

Prinsip ini menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara

berpikir obyektif, runtut dan mantap.

f.Terfokus pada kepentingan warga masyarakat.

Perencanaan pembangunan hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah dengan melibatkan seluruh unsure pelaku pembangunan di wilayah setempat. Unsur pelaku pembangunan desa tersebut meliputi elemen-elemen warga masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, aparat pemerintah desa, aparat pemerintah kabupaten (khususnya SKPD terkait), LSM dan institusi lain yang terkait. Proses penyusunan perencanaan pembangunan seperti inilah yang dimaksudkan sebagai perencanaan pembangunan partisipatif.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada di desa, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki desa. Dengan

demikian, perencanaan pembangunan desa yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Konsep perencanaan pembangunan partisipatif, perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai *participatory planning*, jika dikaitkan dengan pendapat Friedman (dalam Sinaga, 2005), sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penetapan program-program pembangunan. Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Proses pembangunan tersebut perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran pemerintah bersama masyarakat melalui partisipasi dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio politik, perkembangan sosial budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.

Perencanaan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan yang berupaya untuk memperhatikan usulan-usulan masyarakat atau memulai proses perencanaan dari bawah ke atas, atau suatu model yang melibatkan banyak pihak atau sering disebut pula dengan perencanaan berbasis masyarakat. Perencanaan partisipatif dapat didefinisikan sebagai pihak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya.

Perencanaan partisipatif juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan strategis daerah dalam jangka panjang sesuai dengan visi dan misi daerah, yang dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan operasional. Dalam hal tersebut kebutuhan masyarakat akan dipertemukan dengan kepentingan strategis daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian perencanaan partisipatif pada dasarnya merupakan seni memadukan pendekatan perencanaan yang bersifat *bottom up* dan *top down* secara proporsional, yang berpedoman pada nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang sudah menjadi subyek pembangunan.

Menurut Rohe dan Gates (dalam Jones, 1999), rencana yang melibatkan lebih banyak orang, membuat kegiatan lebih berhasil dan dapat memperbaiki keadaan fisik dan memperkuat kesatuan masyarakat sehingga meningkatkan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Jadi, partisipasi penduduk secara demokrasi itu penting sekali untuk pembuatan rencana. Lebih lanjut Jones (1990) menyatakan metode partisipatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data; kategori dari informasi suatu wilayah terdiri atas fisik (misalnya penggunaan tanah) sampai sosial (misalnya perasaan dan pendirian masyarakat), dari berbagai hal yang dapat diukur (misalnya kependudukan) sampai hal-hal yang tidak dapat diukur (misalnya sejarah).
- b. Identifikasi masalah; jika informasi telah terkumpul, kelompok perencana mencari masalah utama yang merupakan inti dari rencana itu, sehingga dapat ditentukan alternatif sasaran dan penentuan prioritasnya.
- c. Memberikan beberapa tujuan; berbagai tujuan harus merupakan hasil survei dan rapat, agar yakin bahwa tujuan itu mewakili seluruh satuan lingkungan.
- d. Merumuskan rencana; rencana yang telah terkumpul diberi keterangan yang luas mengenai, apa yang harus terjadi (tujuan), beberapa dasar yang akan diikuti (kebijakan), beberapa kegiatan khusus seperti untuk

peta keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan berbagai hal tersebut harus saling mendukung.

- e. Keterangan untuk melaksanakan rencana; kelompok perencana memberikan gambaran bagaimana mekanisme rencana itu dapat dilaksanakan, misalkan beberapa kegiatan yang mula-mula harus dilakukan, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan ide atau gagasan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan mempengaruhi data dalam rencana; para perencana harus menyadari bahwa rencana itu dapat dilaksanakan persis menurut dokumen yang disodorkan, walaupun yang bekerja itu para perencana profesional karena proses waktu dan beberapa kejadian tertentu memberikan informasi lain sehingga harus diadakan pembaharuan data.

Wijaya, 2001 berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak

- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi
 - c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun
 - d. Memperhatikan interaksi diantara stakeholders
5. Legalitas
- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku
 - b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat
 - c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
6. Fisibilitas
- Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Senada dengan ciri-ciri diatas, Samsura (dalam Fitriasturi, 2005 : 40) mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan seluruh stakeholders
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate
3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*)
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

2.1.5 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97).

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).

Sedangkan Menurut Plumer (2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpunwak tunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk

memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Dari pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan beberapa faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan di daerah adalah:

1. Pendidikan

Menurut Khikmawati, (1997: 28) mengatakan bahwa mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi derajat partisipasinya dalam pembangunan. Sedangkan menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu. Secara umum, masyarakat desa memiliki sumberdaya yang sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan di pedesaan.

Oleh karena itu sosialisasi oleh pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat harus sebanding dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pendidikan terutama bagi masyarakat desa terpencil.

2. Pekerjaan

Menurut Angell dalam Ross, (1967), salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi adalah pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki dan dianggap sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pendapatan rendah pada masyarakat di perdesaan merupakan realitas sosial yang terjadi saat ini. Pendapatan merupakan suatu aspek pokok dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. maka apabila pendapatan itu rendah banyak hal yang akan terkena dampak.

3. Jenis Kelamin

Angell dalam Ensiklopedia Wikipedia berjudul partisipasi (2011) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

4. Latar Belakang Sosial Budaya

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan pernah dilakukan oleh:

1. Purnamasari (2008) dengan judul tesis Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dimana dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

proses pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut masih rendah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah

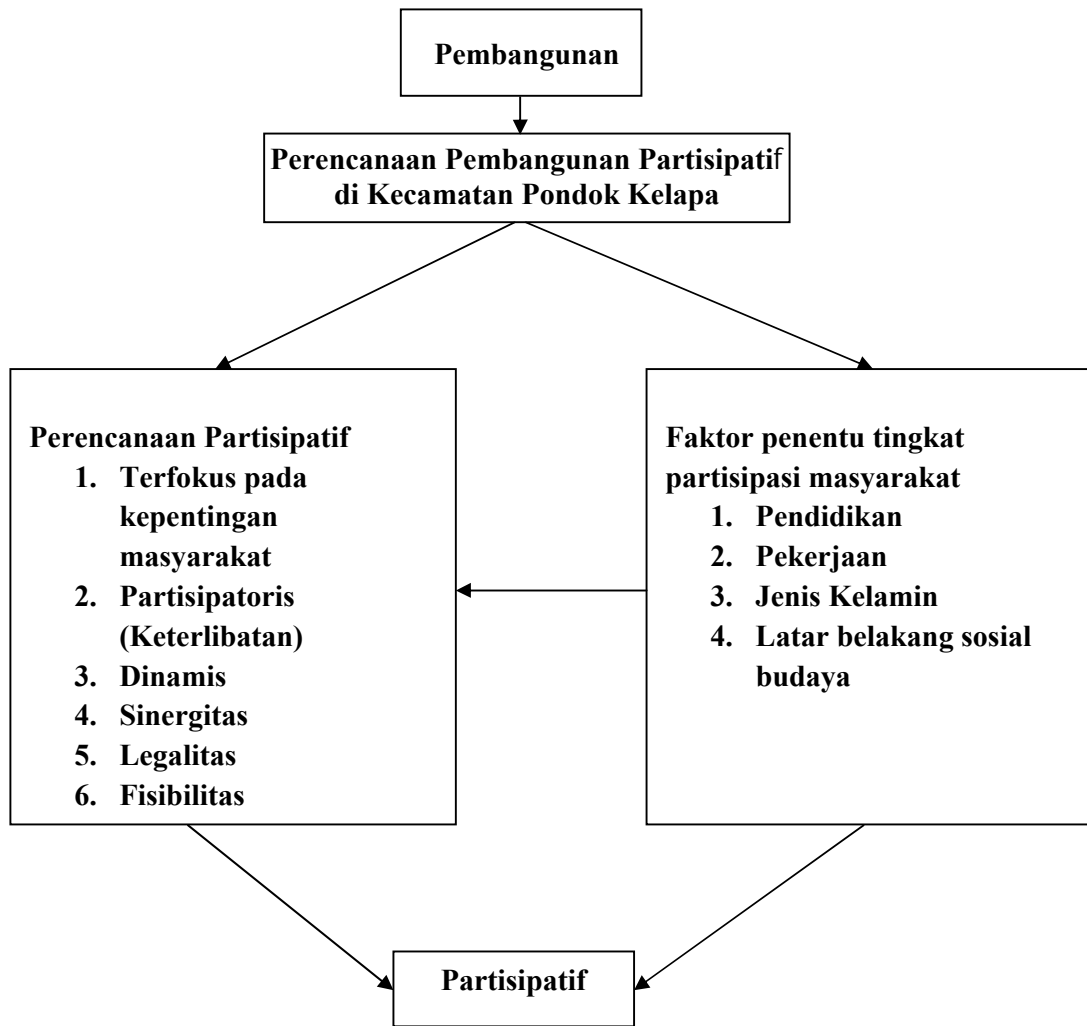
2. Robinson (2011) dengan judul tesis Efektifitas Program Perencanaan Partisipatif Pembangunan Pedesaan (Study Evaluasi Program Pengembangan Fisik di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, analisis kuantitatif dilakukan untuk menilai kinerja pembangunan jalan kampung dan menilai pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma,

Hasil dari penelitian yang dilakukan, pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma berjalan cukup efektif

2.3 Kerangka Analisis

Berikut adalah kerangka analisis sekaligus juga merupakan kerangka teoritik dalam penelitian ini.



Gambar 2.4: **Kerangka Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

3.2 Definisi Operasional

1. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan- keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik yang dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung) yang

dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013.

4. Perencanaan yang terfokus pada kepentingan masyarakat adalah perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013.
5. Perencanaan partisipatif dari sisi partisipatoris (keterlibatan) adalah perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013 dengan memperhatikan kepentingan masyarakat melalui forum pertemuan, masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
6. Perencanaan partisipatif dilihat dari dimensi dinamis adalah perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013 yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak serta proses perencanaan yang berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
7. Perencanaan partisipatif dari sisi sinergitas adalah perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013 dengan memperhatikan keterlibatan semua pihak, penekanan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi, memperhatikan interaksi diantara stakeholders.
8. Perencanaan partisipatif dari sisi legalitas adalah perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2013 dengan mengacu kepada semua peraturan yang berlaku dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat serta tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
9. Perencanaan partisipatif dari sisi fisibilitas adalah perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

pada tahun 2013 yang bersifat spesifik, terukur, dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

10. Pendidikan adalah sekolah formal tertinggi yang pernah di tempuh yang dilihat dari ijazah terakhir yang diterima oleh responden yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
11. Pekerjaan adalah suatu profesi yang biasa dilakukan oleh responden yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya masing-masing.
12. Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari responden yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
13. Latar belakang sosial budaya adalah kepercayaan atau agama yang dianut dan latar belakang (asal maupun etnis) dari responden yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah dari unsur BAPPEDA, camat dan perangkat kantor camat Pondok Kelapa, kepala desa dan perangkat desa, perwakilan masyarakat (BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dll) yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Data sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis, maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (indepth interview)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat-alat bantu lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan membagikan kuesioner setidaknya kepada 40 orang yang terlebih dahulu sudah dianalisa menggunakan teknik purposive sampling.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat

secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Kecamatan Pondok Kelapa terdiri dari 17 desa dengan jumlah desa yang diambil untuk penelitian sebanyak 5 desa yaitu desa Pekik Nyaring, Pasar Pedati, Pondok Kelapa, Sunda Kelapa, dan Srikunoro. Dengan pertimbangan tenaga, waktu, dan biaya, jumlah responden yang diambil sebanyak 40 orang.

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

Tabel 3.1. Informan Dalam Penelitian

INFORMAN	JUMLAH
Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah	1
Camat Pondok Kelapa	1
Perangkat Kecamatan:	
- Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	1
- Staff PMD	2
Kepala Desa:	
- Desa Pekik Nyaring	1
- Desa Pasar Pedati	1
- Desa Sidodadi	1
- Desa Sunda Kelapa	1
- Desa Srikunoro	1
Perwakilan Masyarakat (5 Desa)	
- Sekretaris Desa	5
- Ketua BPD	5
- Anggota BPD	5
- Ketua RT/Dusun	5
- Tokoh perempuan	5

- Masyarakat setempat	5
Total	40

Sumber : Hasil Penelitian Diolah, 2014

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken (2006) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis pembobotan yang dinilai dalam skala likert yang terdiri dari 5 jenjang mulai yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Menurut Nazir (2005), Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan perencanaan. Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932 yang sekarang terkenal dengan nama skala Likert. Skala Likert ini merupakan skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Dan pada evaluasi, skala likert digunakan untuk (a) Menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program (b) Menilai manfaat pelaksanaan suatu kebijakan atau program (c) Mengetahui kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program

Pada skala ini pengukuran nilai menggunakan angka 1 sampai dengan 5. Nilai rata-rata tiap indikator didapat dari rumus berikut:

$$\text{Nilai rata-rata} = \text{Nilai Skor Total Indikator} / \text{Jumlah responden}$$

Untuk menentukan nilai rata-rata tiap indikator dilakukan pengelompokan nilai rata-rata sebagai berikut:

- Nilai 1 – 1,80 : Sangat Rendah
- Nilai 1,81 – 2,61 : Rendah
- Nilai 2,62 – 3,42 : Sedang
- Nilai 3,43 – 4,23 : Tinggi
- Nilai 4,24 – 5 : Sangat Tinggi

Pengukuran skala likert dapat juga menilai apakah pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dengan menggunakan pengukuran nilai antara 1 sampai dengan 5 dapat dikelompokkan nilai sebagai berikut:

- Nilai 1 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat kurang baik
- Nilai 2 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan kurang baik
- Nilai 3 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan cukup baik
- Nilai 4 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan dengan baik
- Nilai 5 : pelaksanaan perencanaan partisipatif berjalan sangat baik

Definisi konsep tentang variable penelitian itu, dioperasionalkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Perencanaan Partisipatif	Terfokus pada kepentingan masyarakat	1. Masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat	Likert
		2. Memperhatikan aspirasi masyarakat	
		3. Motivasi dan peran serta kelompok	
		4. Rasa memiliki pada kelompok	
		5. Peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara	
	Partisipatoris (keterlibatan)	6. Berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif	
		7. Menjamin keterlibatan semua pihak	
	Dinamis	8. Kerjasama antar wilayah administrasi	
	Sinergitas	9. Memperhatikan interaksi diantara stakeholders	
		10. Kepentingan-kepentingan strategis daerah	
	Legalitas	11. Mengacu pada semua peraturan yang berlaku	
		12. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat	
		13. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan	
		14. Bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dengan mempertimbangkan waktu	
Tingkat partisipasi masyarakat	Fisibilitas	1. Tingkat Kehadiran dalam pelaksanaan musyawarah	
		2. Banyaknya usulan yang muncul dalam musyawarah	
		3. Berperan aktif dalam proses pemeliharaan	

Sedangkan untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dengan data yang digunakan berasal dari metode wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara Mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Hariwijaya (2007 : 73-74), Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan.